

# RETHINKING KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN NASIONAL DAN LOKAL

Choirul Mahfud \*)

## ABSTRAK

*Belakangan ini, kajian politik dan pendidikan sangat ramai dibicarakan. Sebab, antara keduanya saling memengaruhi. Salah satu wujudnya adalah berupa kebijakan politik pendidikan. Politik pendidikan membahas hal ihwal kebijakan pendidikan. Urgensi politik pendidikan di sebuah negara dan pemerintahan lokal sangat penting, sama halnya dengan pentingnya kebijakan ekonomi dan kebijakan prioritas lain dalam suatu negara. Masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan*

*Kata kunci : Kebijakan, politik, pendidikan*

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki posisi dan peran yang penting dan menentukan arah kemajuan suatu bangsa. Tidak heran ada juga yang berkata pendidikan seolah sebagai obat penyembuh bagi kondisi serba krisis dan kritis sebuah bangsa. Fakta itu bisa dibaca bagaimana kondisi masyarakat dan negara Jepang ketika diserang dan diluluhlantakkan dengan bom atom tepat di jantung kota Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa itu memberi pelajaran bagi negeri sakura itu untuk mengirim putra terbaiknya belajar ke berbagai negara di dunia dan setelah itu kembali. Kini hasilnya bisa dilihat bagaimana kekuatan Jepang dan pengaruhnya di dunia.

Lebih dari itu, saat ini di banyak negara, pendidikan ditempatkan sebagai pintu masuk untuk mempengaruhi dunia. Ia memiliki posisi yang penting seperti sebuah jalan sutra. Ia seringkali dihubungkan sebagai penggerak terjadinya

transformasi sosial politik menuju masyarakat yang tercerahkan. Bahkan tak jarang untuk kepentingan ideologi dan beragam kepentingan lainnya.

Ulasan itu hanya sekelumit contoh betapa pendidikan memiliki kekuatan yang luar biasa bukan saja jangka pendek, tapi juga jangka panjang. Oleh karena itu, ranah pendidikan selayaknya patut betul-betul dipikirkan. Bila perlu menjadi prioritas pemerintahan saat ini untuk lepas dari krisis multidimensi yang melanda sejak 1997. Tentu saja, langkah-langkah konkrit perlu segera dilakukan. Misalnya, merealisasikan peningkatan anggaran pendidikan sebesar 20 % dari APBN, wajib belajar sembilan tahun dan mengusahakan kesejahteraan guru serta kualitasnya.

Pertanyaannya, siap sediakah memulai meraih cita-cita bangsa dengan sungguh-sungguh dalam mengelola dunia pendidikan ini? Bagaimana seharusnya

\*) Dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya

arah kebijakan politik pendidikan dibuat dan diimplementasikan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentu membutuhkan jawaban yang tidak hanya berupa kata-kata saja. Tetapi juga tindakan dan kebijakan yang baik dan tepat.

Adalah seorang Paulo Freire yang mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, sebab kebijakan politik suatu negara sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Bisa dikatakan hitam putih dunia pendidikan juga amat ditentukan oleh situasi politik. Gambaran ini terkadang mengundang tanya, apa jadinya dan bagaimana bisa bila dunia pendidikan banyak terkontaminasi urusan politik? Tentu tergantung bagaimana para pelaku politik menyikapi pendidikan dan sebaliknya para stakeholders pendidikan menyikapi pengaruh kebijakan politik. Apakah mereka benar-benar menginginkan negara ini maju dan memiliki sumberdaya manusia yang cerdas, mandiri, kreatif, serta penuh inisiatif melalui pendidikan? Atau justru penuh pretensi yang muaranya adalah pada vested interest, pementingan diri sendiri dan kelompok?

Jawaban atas beragam pertanyaan tersebut dapat ditemukan bila mencermati dan menelusuri pembuatan sampai pelaksanaan kebijakan politik pendidikan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu. Pada masa perjuangan kemerdekaan, misalnya, dapat dilihat atau setidaknya mendengarkan kesaksian dari para sesepuh kita bagaimana proses pendidikan dijalankan oleh pemerintah. Periode tahun 1908-1945 ditandai kehadiran pemimpin-pemimpin politik

yang penuh dedikasi dan gigih dalam perjuangan mereka merebut bangsa ini dari tangan penjajah. Mereka adalah pemimpin politik yang dapat dipandang sebagai model yang pantas ditiru. Dr. Wahidin Sudirohusodo kala itu begitu yakin bahwa pendidikan merupakan resep mujarab mengentaskan bangsa dari keterbelakangan dan kemelaratan. Demikian pula tutur tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara mengemas pemikirannya tentang pendidikan dalam sebuah konsep sederhana namun begitu dalam filosofinya: *Ing Ngarso sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberdayakan.

Sebaliknya pada periode 1959-1998 muncul pemimpin-pemimpin dan pelaku-pelaku politik yang tidak lagi berjalan dengan idealisme yang nasionalistik dan patriotik. Mereka lebih banyak berasyik masyuk dengan kepentingan kelompok, karena bagi mereka kekuasaan bukan lagi amanah namun kesempatan untuk memakmurkan diri, keluarga, dan teman-teman dekatnya. Dalam pandangan mereka dunia pendidikan tidak menjanjikan segi finansial apapun, non issue, sesuatu hal yang mudah, yang dapat ditangani siapa saja, sehingga wajar bila kemudian diketepikan, digeser ke pinggir. Hal ini bisa dilihat dari animo partai politik terhadap posisi-posisi politis.

Maka tidak mengherankan bila dalam periode tersebut bahkan hingga sekarang dunia pendidikan mengalami krisis, salah urus. Begitu kata-kata yang tepat terhadap dunia pendidikan kita. Bagaimana tidak, selama lebih dari 32 tahun Orde Baru plus Orde Reformasi,

persoalan pendidikan tak beranjak dari soal kurikulum, materi pendidikan, guru, biaya pendidikan, saran-prasarana, evaluasi akhir, dan masalah-masalah yang sesungguhnya sejak awal telah menjadi permasalahan yang berlarut-larut, tanpa pernah menyentuh substansi yang sebenarnya. Taruhlah sekarang ini ada pelaku politik yang mencoba bersuara agak lantang tentang kebebasan akademik maupun otonomi sekolah dan kampus serta keilmuan, pada kenyataannya tak lebih dari sekedar janji-janji politik manis saja. Sangat mudah diucapkan, namun susah dilaksanakan, karena itu semua amat tergantung pada situasi dan iklim politik.

Sebagaimana dikatakan David N. Plank dan William Lowe Boyd (1994) dalam karyanya *“Antipolitics, Education, and Institutional Choice: The Flight From Democracy”*, bahwa antara pemerintah yang demokratis, politik pendidikan, pilihan institusi, serta anti politik berkorelasi dengan tercapainya tujuan pendidikan yang selaras dengan kepentingan publik. Melalui analisis mereka, bisa dipelajari bahwa dalam masyarakat modern, institusi pendidikan diharapkan menyelaraskan dengan tujuan dan kepentingan publik, lewat tangan para pakar pendidikan. Namun realitanya berbicara lain. Justru, yang sering terjadi adalah konflik berkepanjangan karena kepentingan politiklah yang dominan bermain, baik itu dari para politisi, pengendali pemerintahan, maupun pihak yang berkepentingan lainnya.

Dalam konteks ini, saatnya pengelola pendidikan mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para

pengambil keputusan (politikus) di bidang pendidikan. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada *apriori* berlebihan yang menganggap politik itu selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan atau perbuatan tercela. Paling tidak kaum pendidik harus berani memberi pencerahan kepada para politisi bahwasanya pendidikan itu bersifat antisipatoris dan preparatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Lebih dari itu bisa ikut menjawab problematika hingga mewujudkan cita-cita bangsa. Keberanian kaum pendidik meluruskan arah pemikiran politisi tentang pendidikan sudah barang tentu merupakan terobosan besar, yang pada saatnya nanti diharapkan akan mampu melahirkan suatu budaya politik baru. Yakni budaya politik yang akan mendorong pelaku politik kita bertindak secara adiluhung, jujur dan cerdas serta tahu masalah dan bagaimana memecahkannya.

Persoalan lain politik pendidikan kita adalah komitmennya terhadap kaum marjinal atau kaum miskin. Lewat perspektif pendidikan pembebasan kita bisa bertanya: kepada siapa sesungguhnya politik pendidikan kita saat ini berpihak? Apakah negara sudah sungguh-sungguh mengamalkan salah satu pasal UUD 1945 kita yang berbunyi “anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”? Mengapa ada kesenjangan yang luar biasa tinggi dalam pendidikan kita. Di satu sisi ada sekolah yang luar biasa mahal, dengan fasilitas lengkap, dan hanya orang kaya yang

mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah itu, namun di sisi yang lain ada sekolah dengan fasilitas seadanya yang dihuni kaum marjinal?

Dalam konteks semacam ini, maka tak heran bila ada sindiran bahwa kaum miskin dilarang sekolah atau kuliah! Tentu problematika itu perlu dijawab. Pasalnya, bukankah dengan membiarkan kesenjangan itu terus berlangsung sama dengan membenarkan tesisnya Samuel Bowles dan Herbert Gintis dalam *Schooling in Capitalist America* (1976), bahwa sekolah hanya berfungsi sebagai alat untuk melayani kepentingan masyarakat dominan dalam rangka mempertahankan dan mereproduksi status quo? Ada dua kelompok kaum marjinal yang teralienasi, terdiskriminasi dan jarang mendapatkan perhatian serius oleh publik dalam hal pendidikan: *Pertama*, penyandang cacat (*disabled*). Kelompok ini termasuk mereka yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang memadai. Mereka mengalami apa yang disebut segregasi pendidikan. Pendidikan mereka dibedakan dengan kaum "normal." Segregasi pendidikan ini telah berlangsung sekian lama dengan asumsi, mereka yang cacat tidak mampu bersaing dengan yang normal karena ada bagian syaraf tertentu yang tidak bisa bekerja maksimal (Agus Nuryatno, 2008).

*Kedua*, anak-anak jalanan. Secara kuantitas kelompok ini kian banyak, terutama di kota-kota besar. Mereka adalah kaum miskin kota dan sudah terbiasa dengan kekerasan, seks dan mabuk-mabukan. Di mana peran negara dalam memberi pendidikan yang layak buat

mereka? Meski negara bukan satu-satunya aktor yang bertanggung jawab, tetapi bukankah negara telah diamanati UUD? Jika kita memakai perspektif Paulo Freire, kunci utama agar kedua kelompok itu bisa menjadi subyek yang otonom yang bisa menyadari dan mengkritisi realitas eksistensialnya adalah dengan cara mengembangkan kesadaran kritisnya dan mentransformasi struktur sosial yang tidak adil. Kaum marjinal harus diyakinkan bahwa mereka berhak dan mampu menentukan nasib sendiri, berhak mendapatkan keadilan, berhak melawan segala bentuk diskriminasi. Kita semua tentu berharap bahwa pendidikan kita sudah seharusnya juga berpihak kepada mereka.

Jurgen Habermas (1971) dalam "*Toward a Rational Society*" menengarai, bahwa informasi, ilmu pengetahuan dan pengetahuan merupakan dasar menuju masyarakat rasional atau maju. Dalam situasi semacam ini, Daniel Bell menyebut saat ini adalah era post industri atau era Informasi. Era ini ditandai dengan bergesernya kebutuhan masyarakat dari materi ke informasi. Informasi di sini bisa dimaknai juga sebagai kebutuhan terhadap pendidikan.

Banyak akademisi meyakini, bahwa pembangunan yang mendasar tidak akan terwujud tanpa adanya manusia yang maju. Manusia yang maju tidak akan terbentuk selama buta huruf belum diberantas dalam masyarakat. Kesuksesan pemberantasan buta huruf tersebut bisa menjadi tolok ukur kemajuan suatu masyarakat. Karena, masyarakat yang tingkat buta hurufnya sangat rendah,

diyakini masyarakat tersebut akan lebih mudah mencapai kemajuan dan meraih cita-citanya. Problem kaum disabled dan kaum marjinal yang miskin relevan dipikirkan dan diusahakan jalan solusinya.

Itulah sebabnya, bangsa-bangsa di dunia mendorong untuk mencapai kemajuan ilmu dan langkah pertama untuk mencapainya adalah dengan pemberantasan buta huruf. Memang usaha memberantas buta huruf tidak semudah membalik telapak tangan. Mungkin tepat kita renungi dan 'amalkan' pepatah ini "*Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.*" Maksudnya adalah usaha yang berat tersebut akan menjadi ringan bila dilakukan bersama-sama antara pemerintah dengan seluruh warga masyarakat, baik pejabat maupun rakyat perlu bergandengan tangan memberantas buta huruf. *Last but not least*, arah politik pendidikan suatu bangsa akan menentukan kemana negeri ini dibawa dan dikemudikan. Apakah politik pendidikan sudah senafas dengan cita-cita kehidupan bangsa atau belum? Sudahkah kebijakan politik pendidikan memihak seluruh rakyat tanpa pandang bulu atau simbol perbedaan lainnya? Bagaimana seharusnya kebijakan politik pendidikan dibuat dan diimplementasikan agar sejalan dengan tujuan dan cita-cita bangsa?

Penelitian ini ingin menjawab pertanyaan sebagai berikut, yaitu apa yang dimaksud politik pendidikan, adakah relasi pendidikan dan politik, bagaimana peran negara dan pemerintahan lokal dalam masalah pendidikan, dan bagaimana urgensi politik pendidikan bagi negara dan pemerintahan lokal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Penggalan data diperoleh melalui kajian literatur, informasi media massa dan sumber lain yang mendukung.

## PEMBAHASAN

Dunia pendidikan dan politik selama ini dipandang sebagai dunia yang berbeda bagai langit dan bumi. Dunia politik acapkali dianggap dan dipahami sebagai dunia kotor yang menghalalkan segala cara. Tidak kenal kawan dan lawan. Seringkali, lawan bisa jadi kawan dan kawan bisa jadi lawan, hingga ungkapan miring lainnya. Sementara dunia pendidikan seolah dunia yang berdiri sendiri dan sangat independen atau bebas nilai, ideologi serta kepentingan. Singkatnya, acapkali kita terus memperdebatkan adakah hubungan antara pendidikan dan politik, dan begitu sebaliknya?

Padahal, dunia politik dan pendidikan saling berkait dan saling mempengaruhi, bahkan saling membutuhkan. Hal ini juga disampaikan Irwan Prayitno (2008) dalam tulisannya *Pendidikan dalam Perspektif Politik*, bahwa dunia pendidikan tidak mungkin lepas dari politik dan kekuasaan. Bahkan, politik dan kekuasaan di suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan.

Apa hubungan budaya politik dengan pendidikan? Budaya politik dibentuk dan dikembangkan oleh pelaku politik dan apa yang akan ditentukan oleh pelaku politik sebagai ciri-ciri utama

budaya politik mereka sampai batas tertentu, dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Jadi hubungan antara budaya politik dan pendidikan bersifat tidak langsung. Ini berarti pendidikan tidak secara final membentuk pelaku politik. Pendidikan memberi dasar-dasar kepada tiap calon pelaku politik. Jika dasar-dasar ini baik dan kokoh, besar kemungkinan (probabilitasnya) akan lahir pelaku-pelaku politik yang baik. Namun, jika dasar-dasar yang diberikan oleh pendidikan jelek dan rapuh, kemungkinan besarnya ialah yang akan muncul di kemudian hari adalah pelaku-pelaku politik yang jelek dan rapuh pula.

Berdasarkan generalisasi ini dapat dipahami mengapa perilaku para pelaku politik dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang baik berbeda dengan perilaku pelaku politik yang berasal dari masyarakat dengan sistem pendidikan yang kurang memadai. Dalam masyarakat kita, misalnya, para pelaku politik dengan latar belakang pendidikan pesantren yang baik, berbeda perilakunya dari pelaku politik yang datang dari pendidikan pesantren yang kurang terpelihara atau dari latar belakang pendidikan yang berbau aristokrasi dan meritokrasi feodal atau militer.

Menurut Paulo Freire, masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Maka dalam konteks demokratisasi dan desentralisasi di Indonesia peran politik (eksekutif dan legislatif) begitu besar. Sehingga, ranah politik dan kekuasaan mampu menjadi wahana bagi espektasi

publik akan sebuah sistem pendidikan yang mencerahkan. Paulo Freire yang oleh banyak kalangan sering disebut sebagai salah satu tokoh liberalisme pendidikan, telah mengarang buku yang diberi judul *The Politic of Education*.

Freire melukiskan persoalan menyangkut pemberantasan buta huruf, peran guru, reformasi agraria, peran pekerja sosial, pemberantasan buta politik, humanisasi pendidikan, peran gereja, dan sebagainya yang tidak terlepas dari politik pendidikan. Negara yang politik pendidikannya buruk, kinerja pendidikannya pun juga buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga bagus.

Pertanyaannya, bagaimana politik pendidikan di negara kita? Hal ini cukup menggelitik untuk diklarifikasi. Kalau kita enggan menyatakan politik pendidikan kita buruk, setidaknya-tidaknya kita dapat menyatakan bahwa politik pendidikan di negara kita belum sepenuhnya positif. Indikasinya tak sulit; komitmen yang rendah, besarnya anggaran yang tidak memadai, manajemen pendidikan yang lemah, dan sebagainya. Untuk melihat realitas politik pendidikan di Indonesia, kita bisa mengukurnya dari kebijakan dan praktik pendidikan yang ada. Pemerintah telah menetapkan Renstra pendidikan tahun 2005-2009 dengan tiga sasaran pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai, yaitu meningkatnya perluasan dan pemerataan pendidikan, meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan; dan meningkatnya tata pemerintahan (governance), akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Karena itu, kebijakan pendidikan nasional harus mampu menghadirkan pemerataan pendidikan yang bermutu pada setiap sisinya. Dalam konteks *outcome*, pendidikan nasional harus mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan intelektual dan akhlak mulia secara seimbang. Pembangunan pendidikan hendaknya dapat membangun manusia Indonesia seutuhnya sebagai subyek yang bermutu. Membangun manusia seutuhnya berarti mengembangkan seluruh potensi manusia melalui keseimbangan olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah jiwa yang dilakukan seiring dengan pembangunan peradaban bangsa.

Namun realitasnya, ternyata kebijakan dan praktik pendidikan masih jauh panggang dari api. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan mengalokasikan anggaran pendidikan, pemerataan akses dan angka partisipasi pendidikan masyarakat, kualifikasi dan mutu profesionalisme serta kesejahteraan guru, dan daya saing lulusan pendidikan di dunia kerja.

Disadari, bahwa untuk memajukan dunia pendidikan nasional dan meningkatkan kualitas SDM bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan, maka pemenuhan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD adalah menjadi keniscayaan. Komitmen serius untuk terus meningkatkan anggaran pendidikan adalah persoalan mendesak, jika kita betul-betul serius ingin mencerdaskan kehidupan bangsa ini melalui pendidikan yang bermutu. Karena, UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) telah

mengamanahkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya duapuluh persen dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Bahkan, UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 49 ayat (1) menegaskan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selama ini Pemerintah bersama-sama dengan DPR-RI telah sepakat untuk menempatkan alokasi anggaran pendidikan menjadi prioritas tertinggi dalam penetapan APBN setiap tahun. Hal ini dapat dilihat pada kenaikan anggaran di Departemen Pendidikan dan Agama yang melonjak sangat tinggi pada tiga tahun terakhir. Upaya untuk memenuhi anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen dari dana APBN, diluar gaji dan pendidikan kedinasan, telah diupayakan untuk direalisasikan secara bertahap sampai tahun 2009. Rentang kenaikannya adalah dari yang semula hanya 6,6 % pada tahun 2004, menjadi 9,3 % untuk tahun 2005, kemudian menjadi 12 % untuk tahun 2006, lalu menjadi 14,7 % untuk tahun 2007, selanjutnya menjadi 17,4 % untuk tahun 2008, dan pada tahun 2009 menjadi 21,1 %. Anggaran pendidikan pada tahun 2006 memang telah mencapai Rp45,3 triliun, meningkat menjadi Rp52,4 triliun pada tahun 2007, dan meningkat menjadi Rp61,4 triliun pada tahun 2008.

Anggaran pendidikan di APBN sebenarnya terus naik cukup signifikan sejak 2003. Fenomena penurunan persentase anggaran hanya sempat terjadi pada 2002. Ketika itu, anggaran pendidikan hanya mendapatkan porsi 3,76 persen. Padahal, pada 2001 sudah mencapai 4,55 persen. Setelah itu, anggaran pendidikan terus bertambah menjadi 4,15 persen pada 2003; 6,6 persen (2004); 7 persen (2005); 9,1 persen (2006); dan 11,8 persen (2007). Dalam APBN 2007, pendidikan telah berhasil mendapatkan porsi terbesar. Begitu juga dalam RAPBN 2008.

Sampai saat ini masih banyak anak usia SD, SMP, SMA dan SMK yang tidak bersekolah. Secara definitif angkanya sangat tinggi, mencapai jutaan anak. Angka partisipasi pendidikan untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK ternyata masih rendah. Ditambah lagi dengan tingginya angka putus sekolah dan buta aksara. Terkait dengan rendahnya partisipasi pendidikan, data Depdiknas 2006 menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/SDLB/Paket A baru mencapai 94,73%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B sebesar 88,68%, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C sebesar 55,22%, dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi baru mencapai 16,70%. Adapun mengenai tingginya angka putus sekolah, tercatat bahwa angka putus sekolah tingkat SD sebanyak 2,97%, SMP 2,42%, SMA 3,06%, dan PT 5,9%.

Sementara, tingginya jumlah warga negara yang masih buta huruf, tercatat bahwa dari total penduduk sebanyak 211.063.000, yang masih buta huruf pada

usia 15 tahun ke atas, berjumlah 15,4 juta, dengan perbandingan laki-laki sebesar 5,8% dan perempuan sebesar 12,3%, dengan penyebaran di perkotaan sebesar 4,9% dan di pedesaan 12,2%. Bahkan, berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, hingga akhir tahun 2006, masih 12,88 juta penduduk Indonesia, tersebar di pedesaan dan perkotaan, yang buta aksara. Kondisi ini memang sedikit lebih baik dibandingkan kondisi di tahun 2005 yang sebanyak 14.595.088 orang. Walaupun demikian, masih belum mampu mengeluarkan Indonesia dari kelompok negara-negara (ada 34 negara) di dunia yang jumlah penduduk buta aksaranya di atas 10 juta orang.

Tingginya angka buta aksara inilah yang memberi andil menempatkan peringkat IPM Indonesia di posisi bawah. Dua per tiga dari total penilaian atas kriteria pendidikan didasarkan pada jumlah penduduk di atas 15 tahun yang buta aksara. Artinya, jika angka buta aksaranya masih tinggi maka nilai atas pendidikan jadi rendah. Kesulitan dalam upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia disebabkan oleh kenyataan bila masih sangat banyak anak yang putus sekolah bahkan tidak sekolah. Disamping itu, minimnya anggaran juga disinyalir menjadi penyebab terhambatnya pemberantasan buta aksara. Pada tahun 2006 lalu pemerintah hanya menanggarkan dana Rp. 175 miliar, padahal dibutuhkan sedikitnya Rp. 450 miliar untuk menekan angka buta aksara. Kondisi ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap pendidikan yang masih sangat rendah seiring dengan kecilnya alokasi

anggaran pendidikan dalam APBN 2007, yakni hanya 11,8 persen.

Bagaimana dengan guru? Indonesia termasuk salah satu negara yang jumlah guru berpendidikan primer setara S1 yang kurang dari 50 persen. Ini berarti dari jumlah 2,7 juta guru, sebanyak 1,35 juta orang guru belum mencapai kualifikasi S1. Laporan Diknas tahun 2006 menjelaskan bahwa guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, baru mencapai target 35,6% saja. Jadi, sebanyak 64,4% guru belum memenuhi kualifikasi S1/D-IV. Sedangkan, dosen yang memenuhi kualifikasi S2/S3 baru mencapai 54,02%. Jadi, masih ada sebanyak 45,08 % dosen yang belum memenuhi kualifikasi S2/S3. Pada tahun 2007, Depdiknas baru berhasil meningkatkan kualifikasi guru hingga S1/D4 sebanyak 81.800 guru dan melakukan sertifikasi guru sebanyak 147.217 orang.

Padahal, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, guru merupakan berperan amat sentral. Guru adalah jantungnya pendidikan. Tanpa denyut dan peran aktif guru, kebijakan pembaruan pendidikan secanggih apa pun tetap akan sia-sia. Sebagus apa pun dan semodern apa pun sebuah kurikulum dan perencanaan strategis pendidikan dirancang, jika tanpa guru yang berkualitas, maka tidak ada gunanya. Artinya, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan tergantung pada kondisi mutu guru. Hal ini ditegaskan UNESCO dalam laporan *The International Commission on Education for Twenty-first Century*, yakni "memperbaiki mutu pendidikan pertama-tama tergantung perbaikan perekrutan, pelatihan, status sosial, dan kondisi kerja para guru; mereka

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, karakter personal, prospek profesional, dan motivasi yang tepat jika ingin memenuhi ekspektasi stakeholder pendidikan" (Jacques Delors, 1996).

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah seberapa serius pemerintah menghormati dan menjunjung tinggi profesi guru yang telah banyak berperan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta mencerdaskan kehidupan bangsa? Apa yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan mutu profesi guru sebagai pendidik? Lalu bagaimana dengan kesejahteraan dan nasib masa depan guru di tengah tuntutan dan himpitan ekonomi saat ini? Terlepas dari masih banyaknya persoalan kebangsaan yang menjerat kita, dalam konteks pembangunan sektor pendidikan, komitmen serius untuk terus meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru merupakan suatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, jika kita mau betul-betul serius ingin membangun bangsa ini menjadi lebih beradab. Sebab, guru yang bermutu dan sejahtera memegang peran amat sentral dalam proses pendidikan.

Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pada program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2008 untuk kegiatan sertifikasi pendidik bagi sekitar 200.000 orang guru, peningkatan kualifikasi akademik guru ke S1/D4 sebanyak 270.000 guru, peningkatan kompetensi guru Dikdas sebanyak 3.049 guru, dan peningkatan kompetensi guru Dikmen sebanyak 12.828 guru. Adanya komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru bisa

dijadikan sebagai momentum pembangkit kembali idealisme guru dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Sehingga, masa depan Indonesia bisa lebih maju, berkualitas, berbudaya, cerdas, dan dapat bersaing dalam percaturan dunia. Namun, persoalannya adalah bagaimana agenda tersebut dapat diimplementasikan dan diwujudkan secara nyata, konkret, dan didasarkan atas kemauan politik dan keseriusan tekad pemerintah.

Keadaan tersebut memberi gambaran mengenai politik pendidikan di Indonesia yang masih jauh dari kata-kata surga dan menjanjikan. Politik pendidikan kita belum mampu memberikan harapan konkret atas kemajuan bangsa ini di masa depan. Pendidikan di negara kita masih berada (diletakkan) di ring marginal sehingga politik pendidikan kita sangat rentan terhadap ekspansi gemerlapnya politik lain yang lebih dominan; katakanlah dengan politik ekonomi, politik kebudayaan, politik keamanan, dan yang lebih khusus politik kekuasaan. Tidak bisa dibantah bahwa politik pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya positif dan solid, bahkan ada yang menyatakan "runyam". Masalahnya sekarang ialah bagaimana upaya yang harus kita lakukan untuk membangun politik pendidikan yang solid dan menjanjikan itu. Banyak cara dapat dilakukan untuk membangun politik pendidikan di suatu negara; namun keseluruhan cara itu umumnya berawal dari komitmen para penentu politik pendidikan itu sendiri. Dalam hal ini antara lain ialah para elite politik, pejabat pemerintah serta para pengambil kebijakan negara. Mereka semua harus diketuk

hatinya supaya memiliki komitmen yang memadai sehingga dapat bersikap "sadar didik" (*sense of education*). Artinya, menyadari pentingnya pendidikan untuk membangun manusia dan bangsanya. Tanpa pendidikan (yang baik) tidaklah mungkin suatu bangsa dapat berkembang secara konstruktif dinamis.

Komitmen itulah yang belum dimiliki oleh kebanyakan elite politik, pejabat pemerintah, serta para pengambil kebijakan pemerintahan lainnya di negara kita pada umumnya. Para "petinggi" negara kita sampai hari ini masih lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat jangka pendek daripada jangka panjang. Mereka umumnya lebih senang membuat keputusan-keputusan politik untuk kepentingan hari ini daripada kepentingan hari esok.

Di samping itu, dari kalangan pendidik juga harus ada kesadaran untuk bisa menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif memengaruhi para pengambil keputusan di bidang pendidikan. Dengan begitu, kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada apriori berlebihan yang menganggap politik itu selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan, sehingga dengan mempolitikkan pendidikan berarti melakukan perbuatan tercela. Paling tidak, kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan kepada para politisi bahwasannya pendidikan itu bersifat antisipatoris dan preparatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu

mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kalau kemudian ada kesan bahwa pendidikan tak dapat berbuat apa-apa saat ini, maka asumsi tersebut harus dirubah. Ke depan, pendidikan harus punya andil yang lebih besar dalam membentuk tata kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan kemajuan peradaban bangsa.

Dengan demikian, jelaslah bahwa pendidikan bisa dijadikan sebagai sarana membangun kehidupan sosial politik dan peradaban bangsa yang unggul. Karena, manusia-manusia yang lahir dari rahim pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keimanan, berakhlak mulia, memiliki kompetensi dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Tentu saja, ada prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penyelenggaraan pendidikan agar berfungsi untuk mendorong memantapkan kehidupan sosial politik dan peradaban bangsa yang unggul tersebut, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 4, yaitu:

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang

berlangsung sepanjang hayat.

- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

### **Rethinking Politik Pendidikan**

Pengertian politik pendidikan adalah kebijakan politik terkait dengan masalah pendidikan. Maksudnya, penggunaan wewenang politik kekuasaan untuk membuat kebijakan pendidikan (*educational decision making*), yang bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan hingga kekerasan (fisik) untuk mendesak implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan bersifat lunak bila menekankan implementasi kebijakan politik kekuasaan secara halus (*subtle*) lewat strategi taktis operasional.

Strategi halus bisa juga lewat pola indoktrinasi dan penyeragaman yang berlandas tumpu pada proses "pencucian otak" dan pembodohan politik peserta didik dengan menabukan perbedaan pendapat, kemerdekaan berpikir dan berserikat, serta berprakarsa, seperti yang pernah dipraktikkan rezim Orba,

hendaknya segera dibuang jauh-kauh. Peserta didik justru harus dikondisikan untuk mulai terbiasa mengapresiasi sikap berbeda pendapat di tengah pluralisme budaya.

Produk kebijakan politik pendidikan di suatu negara dan pemerintahan lokal bisa dilihat dalam berbagai ragam kebijakan Undang-Undang dan peraturan lain yang berkait langsung maupun tidak langsung terhadap dunia pendidikan. Di Indonesia, produk kebijakan politik pendidikan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional sudah mengalami dua kali perubahan. Perubahan pertama, perubahan dari Undang-Undang produk kolonial Belanda yang dipakai dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan dunia pendidikan kita hingga akhirnya muncul undang-undang pendidikan nasional pada tahun 1989. UU tersebut dikenal sebagai UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya, aturan main penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih belum jelas dan masih sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial Belanda saat itu. Saat ini, kita sudah memiliki aturan main baru sebagai produk kebijakan politik pendidikan pasca Orde Baru, yakni UU No. 20 Tahun 2003 yang kita kenal sebagai UU Sisdiknas. UU ini produk reformasi sebagai amandemen dari UU No.2 Tahun 1989.

Di tingkat lokal, politik pendidikan bisa berupa kebijakan pendidikan gratis, sebagaimana yang kini dipraktikkan di Palembang, Sumatera Selatan. Dan wajah dan arah kebijakan politik pendidikan di pemerintahan lokal di daerah lain, seperti di Jawa Timur akan lain lagi. Semua itu,

tidak lepas dari kepentingan politik dan prioritas apa yang menjadi program utama kepemimpinan politik lokal.

Dalam konteks ini, maka politik pendidikan membahas seluk beluk masalah pendidikan. Dibincang oleh politisi juga praktisi dan pemikir pendidikan. Selain bahasan regulasi Undang-Undang dan peraturan, juga membahas dan memilah kajian pendidikan. Misalnya, soal birokrasi lembaga pendidikan formal (termasuk dalam pembinaan pendidikan Islam di jalur sekolah) merupakan tindak lanjut dari kebijakan yang didasarkan pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas pada bab IV pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur di luar sekolah. Lebih lanjut pada pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.

Dari uraian tersebut, ada lembaga pendidikan agama yang diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan formal, yang tentunya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan standarisasi dan strukturisasi model pendidikan umum (Baca: sekolah model pemerintah) secara ketat. Sedangkan lembaga pendidikan Islam yang berkembang di luar model pendidikan pemerintah tidak diakui eksistensinya. Pendidikan keagamaan di jalur sekolah secara berjenjang dan berkelas sebagai istilah untuk jenis pendidikan

Islam lebih dikenal dengan sebutan madrasah.

Kebijakan politik pendidikan terus berubah seiring kemajuan zaman. Di era otonomi daerah misalnya, dunia pendidikan seolah ikut berubah. Bisa dikatakan model birokrasi yang berlaku pada lembaga pendidikan menjadi berbasis otonomi. Ide otonomi daerah di Indonesia identik dengan konsep desentralisasi yang sebenarnya sudah cukup lama dimulai, yaitu sejak tahun 1973. Upaya ke arah pelaksanaan desentralisasi semakin gencar dengan maraknya tuntutan terhadap reformasi total. Puncaknya pada tahun 1999 telah ditetapkan dua perundang-undangan, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang selanjutnya disusul dengan terbitnya PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom.

Sebagai sebuah kebijakan politik, desentralisasi berarti pemberian wewenang dari pemilik wewenang kepada pelaksana penguasa di bawahnya. Misi utama pemberian otonomi pendidikan kepada masyarakat adalah membangun perangkat infrastruktur sistem pendidikan yang memihak kepada pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan restrukturisasi pendidikan dan rekapitulasi pendidikan. Akibat logis pemberian otonomi pendidikan ini adalah dijalankannya kebijakan desentralisasi pendidikan. Dengan demikian, konsep desentralisasi pendidikan sesungguhnya hendak memberikan keleluasaan kepada

lembaga pendidikan dalam setiap aktivitas kelembagaan dan kependidikannya.

Dengan suatu harapan, agar setiap lembaga bisa menyesuaikan dirinya dengan masing-masing situasi dan kondisi atau harapan serta keutuhan masyarakat yang ada di sekitarnya. Konsep ini sangat penting, sebab pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membawa rakyat menuju pengembangan diri sehingga mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman dan budayanya.

### Urgensi Politik Pendidikan

Paulo Freire dan Agus Suwignyo menyatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Dalam konteks ini, Dale membedakan antara politik pendidikan dan pendidikan politik dengan mengemukakan pernyataannya. Menurutnya, pendidikan politik adalah studi terhadap efektifitas sistem pendidikan dan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan dalam mencapai tujuan yang dibebankan kepada mereka. Dale kemudian mengemukakan tiga ciri utama studi ini; (1) mempertanyakan proses pembuatan keputusan, (2) mereduksi politik menjadi administrasi, dan (3) terfokus pada *machinary* (perangkat kerja).

Sedangkan politik pendidikan menurut Dale adalah relasi antara produksi tujuan-tujuan dan bentuk-bentuk pencapaiannya. Fokusnya ada pada kekuatan yang menggerakkan *machinary*, bagaimana dan dimana *machinary* tersebut diarahkan. Konsentrasi kajian politik

pendidikan bagi Dale ada pada peranan negara. Ia yakin dengan melalui studi tentang politik pendidikan dapat menerangkan pola-pola, kebijakan, dan proses pendidikan dalam masyarakat secara memadai, di samping memungkinkan kita untuk mempertanyakan persoalan-persoalan di seputar asumsi, maksud dan *outcome* berbagai strategi perubahan pendidikan.

Ketidaktahuan atas proses politik, pimpinan lembaga pendidikan akan mengalami disinformasi tentang sejauhmana prosedur demokratis terlibat dalam pembuatan keputusan. Para administrator pendidikan saatnya harus melihat aktor-aktor lain dalam sistem pengambilan keputusan. Pada konteks berfikir seperti inilah wawasan tentang politik pendidikan penting bagi siapapun yang konsern dengan persoalan pendidikan. Berdasarkan pemikiran yang telah disampaikan tersebut, politik pendidikan dapat dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan. Sifatnya, bisa keras dan bisa lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan lunak menekankan implementasi kekuasaan secara halus (*subtle*) lewat strategi taktis. Aksi pemogokan guru, unjuk rasa para guru, merupakan wujud politik pendidikan yang keras.

Kalangan pendidik sudah saatnya mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif mempengaruhi para pengambil

keputusan di bidang pendidikan. Dengan begitu kaum pendidik tidak lagi terkungkung dalam dunianya, melainkan memiliki ruang gerak yang lebih leluasa dan signifikan. Jangan sampai ada *apriori* berlebihan yang menganggap politik itu selalu bermuka dua dan berkubang kemunafikan, sehingga dengan mempolitikkan pendidikan berarti melakukan perbuatan tercela. Paling tidak kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan kepada para politisi bahwasanya pendidikan itu bersifat antisipatoris dan preparatoris, yaitu selalu mengacu ke masa depan dan selalu mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi kehidupan mendatang. Kalau kemudian ada kesan bahwa pendidikan tak dapat berbuat apa-apa saat ini, harus dimaklumi; namun ke depan, ia akan punya andil yang sangat besar dalam membentuk tata kehidupan ekonomi dan politik.

*Ala kulli hal*, urgensi politik pendidikan di sini sangat penting. Dan sama halnya dengan pentingnya kebijakan ekonomi dan kebijakan prioritas lain dalam suatu negara. Di sini, pengelola pendidikan sudah saatnya untuk mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif memengaruhi para pengambil keputusan (politikus) di bidang pendidikan. Harapannya, kaum pendidik tidak lagi dipolitisasi, melainkan bisa ikut andil peran secara signifikan. Jangan sampai ada *apriori* berlebihan yang menganggap politik itu kotor, selalu bermuka dua yang penuh kemunafikan dan perbuatan tercela. Paling tidak kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan positif kepada para politisi.

Lebih dari itu bisa ambil bagian dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang lebih memihak kemajuan mutu pendidikan dan masalah kesejahteraan pendidiknya.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

- Dunia pendidikan dan dunia politik selama ini dipandang sebagai dunia yang berbeda bagai langit dan bumi. Dunia politik acapkali dianggap dan dipahami sebagai dunia kotor yang menghalalkan segala cara. Sementara dunia pendidikan seolah dunia yang berdiri sendiri dan sangat independen atau bebas nilai, ideologi serta kepentingan. Padahal, dunia politik dan pendidikan saling berkait dan saling memengaruhi, bahkan saling membutuhkan. Bahkan, politik dan kekuasaan di suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan.
- Pengertian politik pendidikan adalah kebijakan politik terkait dengan masalah pendidikan. Maksudnya, penggunaan wewenang politik kekuasaan untuk membuat kebijakan pendidikan (*educational decision making*), yang bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan hingga kekerasan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya, politik pendidikan bersifat lunak bila menekankan implementasi kebijakan politik kekuasaan secara halus (*subtle*) lewat strategi taktis operasional.
- Peran negara dalam bidang pendidikan sangat signifikan memengaruhi warna

warnanya. Apakah kebijakan itu menguntungkan warga negara atau memihak kepentingan kelas dan kelompok tertentu bisa dibaca dan dilihat dari output kebijakan politiknya.

- Urgensi politik pendidikan di sebuah negara dan pemerintahan lokal sangat penting. Sama halnya dengan pentingnya kebijakan ekonomi dan kebijakan prioritas lain dalam suatu negara. Masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan. Di sini, pengelola pendidikan sudah saatnya untuk mencoba menyelami dunia politik. Maksudnya, masyarakat pendidikan harus aktif memengaruhi para pengambil keputusan (politikus) di bidang pendidikan. Harapannya, kaum pendidik tidak lagi dipolitisasi, melainkan bisa ikut andil peran secara signifikan. Jangan sampai ada *apriori* berlebihan yang menganggap politik itu kotor, selalu bermuka dua yang penuh kemunafikan dan perbuatan tercela. Paling tidak kaum pendidik harus berani memberikan pencerahan positif kepada para politisi. Lebih dari itu bisa ambil bagian dalam pembuatan kebijakan pendidikan yang lebih memihak kemajuan mutu pendidikan dan masalah kesejahteraan pendidiknya.

## Saran

- Politik pendidikan sudah seharusnya dipelajari dan disebarkan sebagai agenda mendesak dalam rangka membangun kesadaran publik dalam mewujudkan cita-cita dan kepentingan bersama dalam bidang pendidikan dan lainnya.
- Para pembuat kebijakan politik pendidikan sudah seyogyanya duduk bersama dengan pelaksana kebijakan politik pendidikan dalam perumusan dan pembuatan kebijakan pendidikan. Agar tidak terjadi simpang siur dan salah paham yang kerap kali terjadi selama ini.
- Semua pihak dan para stakeholders pendidikan perlu mewaspadai dan mengontrol segala kebijakan pendidikan yang ada apakah kebijakan itu dibuat untuk apa dan sudahkah dijalankan sesuai harapan dan keinginan publik nasional dan lokal. Agar kendala dan hambatan yang membuat tidak maksimalnya operasionalisasi kebijakan politik pendidikan bisa ditangani dengan cepat dan tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

AB, Shamsul, 2001, *"The Redefinition of Politics and the Transformation of Malaysian Pluralism"*, dalam Robert W Hefner (ed), 2001, *The Politics of Multiculturalism: Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia* (Honolulu: University of Hawai'i Press).

Azra, Azyumardi, 2002, *"Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi di Indonesia"*, dalam Ikhwanuddin Syarief & Dodo Murtadlo (eds), *Pendidikan untuk Masyarakat Indonesia Baru: 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar MscEd* (Jakarta: Grasindo).

Brannen, Julia, 1999, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Pustaka Pelajar: Yogyakarta).

Castells, Manuel et al (eds), 1999, *Critical Education in the New Information Age* (Lanham: Rowman & Littlefield).

Chasan, Barry, 1986, *Contemporary Approaches to Moral Education* (New York: Columbia University Teachers College).

Corson, David, 1998, *Changing Education for Diversity* (Philadelphia: Open University Press).

Daen Indrakusuma, Amier, 1973, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Malang: IKIP).

De Vreede, E., 1998, *"Underlying Assumptions in Plural Education"*, makalah disampaikan pada Konferensi the Association for Teacher Education in Europe, Limerick.

Dede Rosyada, 2004, *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana).

Dewey, John, 1964, *Democracy and Education* (New York: The Mac Millan Company).

Freire, Paulo, 2000, *Pendidikan pembebasan* (Jakarta: LP3S).

---, 2000, *Cultural Action for Freedom* (Harvard Educational Review, Monograph Series, No 1, revised

- edition).
- , 1998, *Pedagogy of Hope* (New York: Continuum).
- , *Pedagogy of Freedom* (Lanham: Rowman & Littlefield).
- , 2002, *Politik Pendidikan, kebudayaan, kekuasaan, dan pembebasan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Read).
- Giroux, Henry A, 1997, *Pedagogy and the Politics of Hope* (Boulder: Westview).
- Giroux, Henry & Patrick Shannon (eds), *Education and Culture Studies toward a Performative Practice* (New York: Routledge.)
- Hefner, Robert W, 1998, *Democratic Civility: The History and Cross-Cultural Possibility of a Modern Political Ideal* (Boulder: Westview).
- Huntington, Samuel P, alih bahasa Ruslani, 2000, *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia* (Yogyakarta: Qalam).
- Ihsan, Fuad, 2001, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Jalaluddin, 2001, *Teologi Pendidikan* (Jakarta, PT Raja Grafindo)
- James, Michael, 1996, *Poststructuralism, Politics and Education* (Westport: Bergin & Garvey).
- Mastuhu, 2003, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21* (Yogyakarta: Safiria Insania Press dan MSI UII)
- Mudyahardjo, Redja, 2001, *Filsafat Ilmu Pendidikan, suatu pengantar*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- , 2002, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- Rahman Assegaf, Abd., 2003, *Internasionalisasi Pendidikan; Sketsa Perbandingan Pendidikan Di Negara-Negara Islam dan Barat* (Yogyakarta: Gama Media).
- Ramage, Douglas, 1995, *Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance* (London: Routledge).
- Smith, Samuel, 1986, *Gagasan-Gagasan Besar Tokoh-Tokoh Dalam Bidang Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara).
- Soedijarto, 2000, *Pendidikan Nasional sebagai Wahana mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Membangun Peradaban Negara-Bangsa* (Jakarta: CINAPS)
- Tilaar, H.A.R, 2002, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia* (Jakarta: Grasindo)
- , 2000, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta)
- , 1994, *Analisis Kebijakan Pendidikan, Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya)